

ABSTRAK

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang yang mengatur otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu ada beban berat yang ditumpukan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah, beban itu adalah upaya mensejahterakan, menyerap dan menjalankan harapan dan keinginan masyarakat serta membingkai perilaku dan aktifitas pejabat daerah dalam sebuah peraturan yang sesuai dengan koridor hukum.

Salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang merupakan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan, komitmen-komitmen politik dan sebagai kontrol atas pelaksanaan APBD. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Tegal (2) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Tegal dan (3) Untuk menjelaskan dan mengkaji kendala-kendala apa saja yang dapat mempengaruhi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Tegal serta memberikan solusinya.

Untuk menetapkan tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang dikumpulkan yang selanjutnya dibuat kesimpulan. Untuk mendapatkan data peneliti melakukan wawancara dan observasi kepada ketua dan anggota DPRD Kabupaten Tegal serta wawancara kepada Kepala BPKAD Kabupaten Tegal. Selain itu peneliti juga mencari data melalui bahan kepustakaan. Adapun teori yang digunakan penulis adalah teori pengawasan, teori otonomi daerah, teori anggaran, teori APBD dan konsepsi islam tentang pengawasan.

Hasil penelitian, fungsi DPRD dalam pengawasan pelaksanaan APBD di Kabupaten Tegal, secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian hingga saat ini, DPRD Kabupaten belum memiliki perda yang mengatur mengenai pedoman pengawasan tersebut, selain itu lemahnya kapasitas dan komitmen anggota DPRD menjadi kendala dalam melakukan fungsi pengawasannya, sehingga dalam prakteknya terbuka peluang untuk melakukan tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan DPRD

ABSTRACT

In line with the enactment of the law governing regional autonomy, namely Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, grants the authority to administer regional government that is broader, real and responsible. The existence of a balance of duties and functions between the central government and regional governments causes each region must have sufficient income, the region must have adequate sources of financing to assume the responsibility of implementing local government. In addition there is a heavy burden placed on the regional government and the Regional Representative Council (DPRD) as the spearhead of the implementation of regional autonomy, the burden is an effort to prosper, absorb and carry out the hopes and desires of the community and frame the behavior and activities of regional officials in an appropriate regulation with legal corridors.

One of the functions of the DPRD is to supervise the implementation of the APBD which is a follow-up of the laws and regulations, political commitments and as control over the implementation of the APBD. The objectives of this study are: (1) To identify and analyze the need for supervision of the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget in Tegal Regency (2) To find out and analyze the implementation of the DPRD supervision function in the implementation of the APBD in Tegal Regency and (3) To explain and study what obstacles can influence DPRD's oversight of the implementation of the Regional Budget in Tegal Regency and provide a solution.

To set the objectives of the study, researchers, using analytical descriptive research methods, a method that serves to describe or give a picture of the object under study through data or samples collected which then made conclusions. To get the data, researchers conducted interviews and observations with the chairperson and members of the Tegal Regency DPRD and interviews with the Head of BPKAD of Tegal Regency. In addition, researchers also sought data through library materials. The theory used by the writer is supervision theory, regional otonomi theory, budget theory, APBD theory and Islamic conception of supervision.

The results of the study, the function of the DPRD in overseeing the implementation of the APBD in Tegal Regency, was normatively in accordance with the provisions of the legislation. However, until now, the Regency DPRD does not yet have a local regulation governing the supervision guidelines, besides the weak capacity and commitment of DPRD members is an obstacle in carrying out its supervisory function, so that in practice opportunities are open for Collusion, Corruption and Nepotism.

Keywords: Parliamentary Oversight Function